

Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi

Budi Winarno

*Pengajar Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Gadjah Mada
(E-mail:)*

ABSTRACT

This paper discusses the contributions of globalization to the development of democracy, whether globalization supports or creates a crisis of democracy. Globalization encompasses changes in the field of economic and social combined with interconnectedness between regional and global uniqueness, that all together challenge and reform a political community, especially in the form of modern state. The writer argues globalization contributes to the crisis of democracy when it creates wider gap and inequality because of the rising of transnational corporations. Otherwise, development of information technology supports ideas and transnational movement of democracy, in which the process of democracy run. Authoritarian regimes face great challenges and pressures to open the gate of the process of democracy.

Keywords: *democracy, globalization, transnational corporations, information technology*

Awal tahun 1990-an, dunia menyaksikan keruntuhan Uni Soviet, yang menjadi ancaman utama sistem demokrasi liberal. Keruntuhan itu menandai berakhirnya sistem politik satu partai yang dikembangkan sejak Vladimir Lenin berkuasa dan pernah mengalami masa kejayaannya. Sementara itu, negara-negara Dunia Ketiga, baik karena tekanan International Monetary Fund (IMF) atau World Bank, opini dunia, maupun tekanan-tekanan internal menjadi semakin berorientasi ke arah sistem demokrasi dan pasar bebas.

Globalisasi yang mulai banyak dibicarakan sejak era tahun 1980-an telah menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks politik negara, globalisasi telah mentransformasi kekuasaan politik

negara modern dan warga negara. Beberapa pengamat menyatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik, sedangkan kelompok lainnya mengatakan globalisasi telah menciptakan krisis demokrasi, atau bahkan kematian demokrasi (Winarno 2007).

Dilatarbelakangi perdebatan semacam ini, menjadi menarik untuk mendiskusikan bagaimana hubungan globalisasi dan demokrasi di era sekarang. Pertanyaan yang layak didiskusikan adalah: apakah globalisasi membawa serta demokrasi ataukah sebaliknya, apakah globalisasi menghambat demokrasi dalam arti yang luas? Jika globalisasi membawa serta demokrasi, maka bagaimanakah proses tersebut berlangsung? Demikian juga sebaliknya, jika globalisasi menghambat demokrasi, maka pertanyaan selanjutnya adalah melalui mekanisme seperti apakah sehingga demokrasi di era global sekarang boleh dikatakan berada dalam situasi krisis? Jawaban terhadap pertanyaan ini mengandung interpretasi yang beragam, dan masing-masing kelompok mempunyai argumentasi sendiri yang sepintas masuk akal dan mengandung kebenaran.

Kerangka Konseptual

Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern (Held 2000, 397). Perubahan-perubahan ini melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang mendalam, terjadi di waktu sekarang, dan melibatkan suatu transformasi struktural. Perubahan yang dimaksud di antaranya adalah rezim hak asasi manusia, yang memastikan bahwa kedaulatan nasional tidak dapat menjamin legitimasi suatu negara dalam hukum internasional; pergeseran lingkungan, dalam bentuk pemanasan global akibat kebocoran lapisan ozon; revolusi di bidang komunikasi dan teknologi informasi yang semakin memperluas jangkauan dan intensitas semua alat jaringan sosiopolitik dalam dan lintas batas teritorial negara bangsa; dan deregulasi pasar-pasar kapital yang semakin memperkuat kekuasaan kapital dengan memberinya sejumlah pilihan untuk 'keluar' (*'exit'*) dalam hubungannya dengan buruh dan negara.

Pada akhirnya, semua perubahan tersebut mempunyai implikasi terhadap kapasitas negara dalam melakukan regulasi (Held 2000, 398). Negara-negara bangsa tidak lagi otonom dalam melakukan pengambilan keputusan tanpa memerhatikan aktor-aktor lain di luar dirinya, baik dalam konteks nasional, regional, dan bahkan global. Dalam kaitan ini, globalisasi merupakan suatu proses yang mengejawantah ke dalam suatu transformasi ruang organisasi dari

hubungan-hubungan dan transaksi sosial-yang dinilai berdasarkan tingkat *extensity*, *intensity*, *velocity*, dan dampaknya yang membawa aliran-aliran transkontinental atau interregional dan jaringan aktivitas, interaksi, dan penggunaan kekuasaan (Held 1999, 16).

Dengan demikian, meskipun globalisasi mempunyai akar historis yang panjang, tetapi mempunyai besaran, intensitas, kecepatan, dan dampak yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 1950-an, ekspor dunia yang diukur dari GDP rasio telah meningkat dari di bawah 10 persen naik menjadi 15-20 persen pada 2000 ((Perraton *et al* 2000, 289).

Di bidang keuangan, pergantian pasar pertukaran luar negeri telah meningkat dengan sangat besar melebihi US\$ 15 trilyun setiap harinya. Angka ini merupakan 10 kali dari jumlah perdagangan dunia pada 1979, dan sekarang 60 kali dari perdagangan dunia. Ini menunjukkan bahwa perdagangan dunia dan aliran modal global tidak hanya berlangsung lebih intensif, tetapi juga mempunyai tingkat kecepatan dan besaran yang jauh melampaui masa-masa sebelumnya. Tentunya, pergerakan perdagangan dan modal global ini akan mempunyai dampak yang serius terhadap perekonomian dalam negeri nasional masing-masing negara, terutama negara-negara yang telah mengintegrasikan diri ke dalam perekonomian global.

Di sini, dampak globalisasi bagi ekonomi nasional akan berlangsung melalui tiga mekanisme, yakni tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, dan integrasi pasar keuangan (Garrett 2000, 302). Pertama, menajamnya kompetisi perdagangan merupakan komponen utama dalam tesis-tesis globalisasi konvensional. Kompetisi ini telah diakui secara umum meskipun sebenarnya kompetisi itu tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam memperebutkan investasi. Mekanisme kedua berhubungan erat dengan multinasionalisasi produksi dan berikut ancaman perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksinya dari satu negara ke negara lain dalam rangka mencari keuntungan terbesar. Multinasionalisasi produksi ini berakibat pada biaya-biaya produksi dan pemerintahan intervensionis. Pemerintahan nasional harus menerapkan kebijakan pasar bebas jika mereka ingin berkompetisi dalam memperebutkan investasi dan penyediaan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ketiga, dampak globalisasi terhadap ekonomi nasional terletak pada integrasi pasar finansial global. Integrasi pasar finansial global ini telah mengurangi sedemikian rupa otonomi ekonomi nasional mengingat aliran uang ini tidak dapat dikontrol oleh kekuatan negara manapun.

Pemahaman globalisasi sebagai proses integrasi ekonomi nasional ke dalam perekonomian global tampaknya menjadi konsep yang secara dominan diterima.

Banyak ahli yang menaruh minat dalam kajian globalisasi mendefinisikan globalisasi sebagai proses ekonomi meskipun pada dasarnya globalisasi tidak semata proses ekonomi. Sebaliknya, konsep globalisasi digunakan untuk menjelaskan bidang-bidang kegiatan ekonomi, politik, dan sosial yang melintasi batas-batas teritorial semacam itu. Akibatnya, keputusan dan aktivitas dalam suatu wilayah akan dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu di dunia yang mempunyai jarak cukup jauh (Held 1999, 15).

Kuatnya pemahaman globalisasi sebagai proses ekonomi barangkali disebabkan oleh akibat-akibat integrasi ekonomi dan pasar keuangan global yang dimotori oleh kebijakan neoliberal di seluruh dunia. Kebijakan ini menyandarkan pada pasar bebas *laissez-faire*, yang perjuangan ideologisnya dimulai oleh kelompok Kanan Baru (*the New Right*) di Amerika Serikat dan Inggris. Implikasi globalisasi neoliberal ini telah menyentuh ke dalam hampir semua dimensi kehidupan manusia, yang menurut Herry Priyono merupakan wujud kolonisasi *homo economicus* atas *homo* yang lain dalam diri manusia (Priyono 2004, 8).

Wujud globalisasi neoliberal ini adalah diakuinya hukum darwinisme sosial¹ dalam tata kehidupan masyarakat di mana yang kuat akan berjaya, sedangkan yang lemah akan ditindas dan ditinggalkan (Bourdieu 2003, 28). Dalam tatanan neoliberal², normatif etis yang biasa disebut “kebaikan bersama” (*bonum commune*) tidak lagi dianggap sebagai tujuan yang secara intensional dikejar oleh agenda ekonomi-politik (*intended motive*), tetapi hanya sebagai hasil sampingan (*unintended consequences*) kinerja ekonomi politik (Priyono 2004, 8).

Selanjutnya, melalui pergeseran ini maka proses marginalisasi berjalan sempurna karena berbagai tujuan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, tidak lagi dilihat sebagai tujuan yang secara intensional dikejar oleh kinerja ekonomi politik. Sebaliknya, yang dikejar oleh agenda ekonomi politik neoliberal adalah “the accumulation of individual wealth” (Priyono 2004, 8). Di sini, institusi yang pada abad 17 menjadi kekuatan ekonomi-politik dominan, yakni pemerintah, menjadi memudar. Salah satu implikasinya adalah kuatnya gagasan atomistik tentang “tanggung jawab” dalam konstelasi hubungan antara individu, pemerintah, dan bisnis. Bidang-bidang yang dulu merupakan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan sekarang menjadi tanggung jawab individu sehingga terjadi penggusuran dari *social welfare* menjadi *self-care*. Dalam konteks ini, menurut Herry Priyono, proses marginalisasi akan berlangsung secara ganda, yakni

kelompok-kelompok miskin tidak hanya tersingkir oleh kinerja prinsip “daya-beli-menentukan-hak”, tetapi penghapusan jaring pengaman apabila mereka jatuh.

Berada di sisi lain, dan yang pada akhirnya mendapatkan imbas yang tidak kalah kecilnya adalah demokrasi politik. Demokrasi yang didefinisikan sebagai kebebasan untuk memformulasikan dan menganjurkan alternatif-alternatif politik bersamaan dengan kebebasan untuk berekspresi, kebebasan berbicara dan kebebasan dasar lainnya; kompetisi yang bebas dan tanpa kekerasan di antara pemimpin politik dengan secara periodik melakukan validasi terhadap hukum; memasukkan semua jabatan politik alternatif ke dalam proses-proses demokrasi; dan adanya ketentuan mengenai partisipasi semua anggota komunitas politik, apapun preferensi politik mereka (Carothers 1991, 7). Ini berarti demokrasi mensyaratkan kebebasan untuk membentuk partai-partai politik dan melaksanakan pemilihan umum secara bebas dan jujur secara teratur tanpa mengecualikan jabatan-jabatan politik dari tanggung jawab secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam melihat hubungan antara globalisasi ekonomi dan demokrasi, ada tiga aliran pemikiran yang berkembang (Petras dan Veltmeyer 2002). Kelompok pertama adalah mereka yang melihat bahwa kapitalisme “bertentangan” dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa “muatan demokratis” demokrasi kapitalis adalah produk dari gerakan-gerakan rakyat dan perjuangan kelas, bukannya elemen integral dari ekspansi hubungan-hubungan pasar. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, hasil gabungan antara kapitalisme dan demokrasi tampak sebagai sebuah perkembangan kontradiktif yang ditopang oleh *equilibrium* politik di mana kekuatan-kekuatan demokrasi harus selalu waspada terhadap kecenderungan otoritarianisme yang inheren dalam kekuasaan kapitalis.

Sementara itu, berbeda dengan pandangan pertama yang melihat demokrasi sebagai hasil perjuangan kelas dan bukannya elemen integral dari ekspansi pasar sehingga hubungan kapitalis dan demokrasi lebih bersifat kontradiktif, pandangan kedua berpendapat bahwa pertumbuhan kapitalisme dan demokrasi saling terkait. Di sini, pasar-pasar yang bebas dan pemilu yang bebas dipandang sebagai proses-proses yang saling memperkuat, atau yang satu dianggap sebagai penciptaan prakondisi-prakondisi untuk yang lainnya; liberalisasi ekonomi yang membesarkan kekuatan-kekuatan perkembangan ekonomi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi atau sebaliknya liberalisasi politik dan demokrasi menciptakan kondisi bagi pembangunan ekonomi (Sorensen 2003).

Menurut pemikiran ini, pasar-pasar bebas memperbanyak pilihan, menumbuhkembangkan individualisme, dan memajukan pluralisme sosial, semua bumbu yang penting bagi demokrasi. Karena itu, sebuah sistem politik yang demokratis dianggap sebagai sarana yang sangat diperlukan untuk

menyelamatkan kondisi-kondisi kapitalisme yang dipandang sebagai bentuk paling efektif dan efisien pembangunan ekonomi. Menurut Petras dan Veltmeyer, baik pandangan kubu pertama maupun aliran pemikiran kelompok kedua, telah mendominasi perdebatan politik dan ekonomi sejak tahun 1960-an (Petras dan Veltmeyer 2002, 194).

Namun, belakangan juga telah muncul aliran pemikiran ketiga yang berpendapat bahwa wacana-wacana teoritis yang berangkat dari kedua alur pemikiran di atas melupakan sentralitas “aturan main (politik)” yang mendefinisikan demokrasi yang independen yang berasal dari gerakan-gerakan rakyat atau pasar-pasar kapitalis. Mereka berpendapat bahwa kesepakatan sosial tentang aturan main persaingan politik akan menjamin bahwa kekuatan-kekuatan politik yang bersaing akan menerima hasil-hasil pemilu dan proses demokrasi yang lain dengan asumsi pemegang kekuasaan akan mempunyai kemampuan untuk mempertahankannya, sementara kelompok oposisi mempunyai peluang yang sama untuk memperebutkan kekuasaan tersebut.

Pengelompokan yang dikemukakan oleh Petras dan Veltmeyer dalam melihat hubungan-hubungan globalisasi kapitalis mempunyai kelemahan karena akan melahirkan kecenderungan globalisasi direduksi hanya sebatas pada ekonomi. Padahal, globalisasi mencakup dimensi yang kompleks, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, dan bahkan budaya. Karena itu, pengelompokan ini kurang mampu mendeskripsikan dinamika demokrasi ketika konfigurasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya telah mengalami perubahan akibat globalisasi. Kekuasaan ekonomi politik telah bergeser dari yang berpusat pada negara ke berbagai institusi regional, global, dan masyarakat.

Dengan berkaca pada kelemahan semacam itu, menjadi perlu kiranya untuk mengembangkan suatu tipologi lain dalam melihat hubungan-hubungan globalisasi dan demokrasi. Jika dianalisis secara seksama, maka para ilmuwan yang menaruh minat terhadap demokrasi dapat dibedakan ke dalam tiga aliran utama. Pertama, kelompok yang optimis dalam melihat perkembangan globalisasi dan demokrasi. Keruntuhan komunisme Uni Soviet membuat demokrasi liberal tidak lagi mempunyai pesaing utama sehingga, di era sekarang ini, sebagian besar negara-negara di dunia mengklaim sebagai negara demokratis, dan setiap orang mengaku dirinya sebagai demokrat. Negara-negara Eropa Timur dan Rusia kini juga mulai mengadopsi sistem demokrasi, dan tuntutan ke arah diberlakukannya demokrasi terjadi di mana-mana sehingga negara-negara di dunia kini tengah melangkah ke arah apa yang disebut Fukuyama sebagai ‘*the ideal state*’, yakni demokrasi liberal (Fukuyama 2003, 1).

Kelompok kedua adalah para pemikir yang cenderung pesimis dan bahkan skeptis dalam melihat demokrasi. Keberatan yang diajukan oleh kelompok ini disebabkan

oleh menguatnya kekuatan korporasi beserta elit-elit ekonomi transnasional yang kini sangat berkuasa. Globalisasi ekonomi didominasi oleh korporasi-korporasi global yang tidak dapat dikontrol sebagai aktor kunci, yakni *transnational corporations*. Yeates (2002, 70) mengemukakan bahwa globalisasi telah menghadirkan ekonomi global yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan global yang tidak dapat dikontrol sebagai aktor kunci, yakni *transnational corporations*. Perusahaan-perusahaan transnasional ini dan sekutu mereka merupakan aktor-aktor politik, dan mereka menuai kesuksesan besar dalam menyampaikan pesan ke seluruh dunia bahwa tidak ada alternatif lain kecuali melalui jalan kapitalisme global. Jalan ke arah kemakmuran bersama ini, sebagaimana sering diargumentasikan oleh para korporat, adalah melalui kompetisi internasional yang diputuskan melalui *'free' market* dan *'free' trade*, lembaga dan proses melalui mana mereka mengontrol baik melalui diri mereka sendiri maupun melalui sekutu mereka di tingkat lokal, nasional, regional, dan global (Sklair 2002, 155).

Menurut Robinson, agen-agen ekonomi global ini adalah elit transnasional baru. Elit-elit ini mengendalikan sistem keputusan dan secara cepat memonopoli kekuasaan masyarakat global melalui dominasi politik. Akibatnya, demokrasi yang dipromosikan oleh kelompok-kelompok ini lebih merupakan demokrasi poliarkhis. Suatu sistem yang merujuk pada adanya sekelompok kecil yang benar-benar memiliki kekuasaan dan terikat langsung dalam pembuatan kebijakan, sembari hanya memberi kesempatan kelompok mayoritas pemilih mereka bersaing dalam pemilihan umum yang diawasi secara ketat. Robinson menyebutnya sebagai tipe "demokrasi pura-pura" yang sama sekali tidak melibatkan kekuasaan (*cratos*) dari massa rakyat (*demos*). Kekuasaannya berakhir setelah kelompok elite kecil berkuasa dan menyebabkan semakin menganganya kesenjangan akibat ekonomi global (Robinson 2003, 6-7).

Kelompok pemikir ketiga adalah para ilmuwan yang lebih optimis, tetapi dengan mengajukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi jika demokrasi hendak dipertahankan. Tesis mereka dikembangkan berdasarkan kenyataan bahwa globalisasi telah sedemikian rupa mengurangi kedaulatan dan otonomi negara nasional. Globalisasi telah mendorong terjadinya integrasi ekonomi nasional ke dalam perekonomian global, menciptakan kesalinghubungan dan kesalingtergantungan antarsubsistem sehingga keputusan yang diambil oleh suatu negara bangsa akan memengaruhi negara bangsa lain, demikian juga sebaliknya.

Sementara itu, globalisasi ekonomi telah memunculkan suatu bentuk tantangan baru dan kesadaran baru akan pentingnya kerja sama regional sebagai usaha untuk menjawab tantangan yang dimaksud. Menurut pandangan ini, persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan dan mempunyai imbas terhadap negara bangsa dalam suatu kawasan hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama multilateral antarnegara bangsa, dan mereka hanya akan dapat mengambil

keuntungan ekonomi dari ekonomi global jika bekerja sama satu dengan yang lain dalam satu kawasan (Coleman dan Underhill 1998).

Akibat perubahan-perubahan ini adalah menipisnya batas-batas teritorial negara bangsa karena persoalan-persoalan menyangkut ruang dan waktu telah teratasi sebagai akibat revolusi teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya transportasi dan ketergantungan negara bangsa yang semakin kompleks (Harvey 2000). Interdependensi telah mengurangi otonomi dan kedaulatan negara. Karena itu, model negara Westphalian tidak lagi memadai untuk mendeskripsikan begitu banyak entitas yang disebut sebagai negara bangsa (Krasner 2000, 124).

David Held (1995, 135) mengemukakan lima keterputusan (*disjuncture*) pokok yang menyoroti pola-pola kekuasaan dan tekanan yang berubah yang sedang mendefinisikan kembali arsitektur kekuasaan politik yang berhubungan dengan negara bangsa.³ Pertama, hukum internasional. Perkembangan hukum internasional telah menempatkan individu, pemerintahan, dan organisasi nonpemerintah di bawah sistem pengaturan resmi yang baru. Hukum internasional mengakui kekuasaan dan tekanan, hak dan kewajiban, yang mengatasi klaim-klaim negara bangsa dan yang, meskipun dalam pelaksanaannya mereka tidak bisa didukung oleh institusi-institusi dengan keputusan memaksa.

Kedua, internasionalisasi pembuatan keputusan politik. Menurut Held, wilayah utama keterputusan kedua antara teori negara berdaulat dan sistem global kontemporer terletak pada rezim-rezim dan organisasi-organisasi internasional yang sangat banyak yang dibentuk untuk, pada prinsipnya, mengatur keseluruhan bidang kegiatan transnasional (perdagangan, kelautan, ruang angkasa, dan sebagainya) dan masalah-masalah kebijakan kolektif. Perkembangan rezim-rezim dan organisasi-organisasi internasional telah membawa perubahan-perubahan penting dalam struktur pengambilan keputusan politik dunia. Bentuk-bentuk baru politik multilateral dan multinasional telah terbentuk dan bersamaan dengan itu terbentuk pula pola khusus pembuatan keputusan kolektif yang melibatkan pemerintahan nasional, *International Government Organization* (IGO), dan berbagai kelompok penekan transnasional serta *International Non-Governmental Organization* (INGO).

³ Held mendefinisikan “keterputusan” sebagai sekumpulan kekuatan yang bergabung untuk membatasi kemerdekaan tindakan pemerintah dan negara dengan mengaburkan batas-batas politik dalam negeri, mentransformasikan kondisi-kondisi pembuatan keputusan politik, mengubah konteks kelembagaan dan keorganisasian politik nasional, melakukan pergantingan berulang-ulang kerangka kerja resmi dan praktik-praktik administrasi pemerintah serta mengaburkan garis-garis tanggung jawab dan pertanggungjawaban negara-negara nasional itu sendiri.

Ketiga, kekuasaan hegemoni dan struktur keamanan internasional. Tumbuhnya kekuatan hegemonik, munculnya aktor militer dan perkembangan negara-negara global, yang dicirikan oleh kekuasaan-kekuasaan besar dan blok-blok kekuasaan, kadang-kadang mengurangi otoritas dan integritas negara. Penempatan negara individu dalam hierarki kekuasaan global menentukan tekanan dan jenis-jenis pertahanan dan kebijakan luar negeri yang bisa dicari oleh pemerintah, khususnya pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Keempat, identitas nasional dan globalisasi budaya. Konsolidasi kedaulatan negara pada abad ke-18 dan ke-19 membantu perkembangan identitas rakyat sebagai subyek politik -sebagai warga negara. Ini berarti bahwa orang-orang yang tunduk kepada otoritas sebuah negara secara perlahan menjadi sadar akan hak keanggotaan mereka dalam suatu masyarakat dan sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bisa diberikan keanggotaan semacam itu.

Kelima, ekonomi dunia. Dalam konteks ini, terdapat keterputusan yang jelas antara otoritas formal negara dan jangkauan sistem produksi, distribusi, dan pertukaran kontemporer yang sering berfungsi membatasi wewenang dan keefektifan otoritas politik nasional. Kemajuan teknologi dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi tengah menghilangkan batas-batas di antara pasar yang terpisah -batas-batas yang merupakan prasyarat utama bagi kebijakan ekonomi nasional yang independen (Keohane dan Nye 1991 dalam Held 1995, 130).

Ancaman Globalisasi dan Perkembangan Demokrasi

Perdebatan yang muncul berkaitan hubungan globalisasi dan demokrasi bermuara pada dua persoalan yang bertolak belakang. Pendapat pertama mengatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa globalisasi mengembangkan demokrasi.

Untuk mengukur hal itu tergantung pada seberapa besar ruang gerak yang diberikan globalisasi kepada demokrasi. Di sini, ada dua kriteria yang dapat diajukan, yakni konsep otonomi dan kesetaraan. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas diantara individu dan masyarakat. Jika globalisasi ternyata mampu mendorong otonomi dan kesetaraan yang lebih luas, maka globalisasi dianggap akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi. Sebaliknya, jika globalisasi justru menghambat kedua hal tersebut, maka globalisasi dapat dianggap sebagai ancaman bagi demokratisasi politik.

Menurut David Held, prinsip otonomi merupakan inti proyek demokrasi. Pandangan mengenai negara legal demokratis adalah dasar untuk memecahkan ketegangan yang muncul antara gagasan negara modern dan gagasan demokrasi. Dalam konteks itu, demokrasi kosmopolitan merupakan suatu konsepsi hubungan legal demokratis yang disesuaikan secara tepat dengan dunia bangsa-bangsa yang terjerat dalam jaringan proses regional dan global (Held 1995, 145).

Ketiga konsep ini (prinsip otonomi, negara legal demokratis, dan demokrasi kosmopolitan) merupakan suatu kerangka kerja baru yang tidak bisa dipungkiri bagi pengembangan suatu teori demokrasi. Jika demokrasi berarti “pemerintahan oleh rakyat”, yakni penentuan pembuatan keputusan publik oleh anggota-anggota komunitas politik yang sama-sama bebas, maka dasar pembenarannya terletak pada kemajuan dan peningkatan otonomi, baik bagi individu-individu sebagai warga negara maupun bagi kolektivitas.

Held berpendapat bahwa otonomi mengandung pengertian kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar diri, melakukan perenungan diri, dan melakukan penentuan diri. Otonomi mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih, dan melakukan (atau mungkin tidak melakukan) tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik dengan memahami kebaikan demokrasi atau kebaikan umum (Held 1995, 146). Prinsip otonomi ini mengandung dua gagasan pokok. Pertama, rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri. Kedua, pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi kekuasaan yang dibatasi secara resmi (Held 1995, 147).

Kesetaraan merujuk pada konsepsi politik bahwa individu harus mempunyai kesamaan politik yang setara agar proses politik berjalan demokratis. Jika kesetaraan semakin lebar, maka proses demokratis juga akan semakin berkurang. Ketidaksetaraan yang bersumber dalam kapitalisme pasar menghasilkan ketidaksetaraan yang serius dalam politik di antara warga negara (Dahl 1998, 178). Ini terjadi karena penguasaan sumber-sumber ekonomi langka dalam masyarakat pada akhirnya juga merepresentasi dalam bentuk penguasaan politik. Akibatnya, orang-orang yang mempunyai kekayaan lebih akan mempunyai peluang lebih besar untuk memengaruhi proses-proses politik. Pada akhirnya, ketidaksetaraan dalam ekonomi akan mengakibatkan ketidaksetaraan politik.

Dalam kaitannya dengan kedua hal ini, otonomi dan kesetaraan, tampaknya globalisasi memberikan sumbangan yang tidak begitu bagus. Para pemikir kritis telah dengan tajam menganalisis bagaimana globalisasi menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan karenanya memberikan kontribusinya yang buruk bagi demokrasi. Seperti dikemukakan Korten:

Korporasi telah muncul sebagai institusi pengendali yang dominan di planet ini, dengan yang terbesar di antara mereka menjangkau hampir semua negara di dunia dan memiliki ukuran dan kekuatan yang lebih besar daripada kebanyakan pemerintahan. Makin lama, kepentingan korporatlah dan bukan kepentingan manusia, yang menentukan agenda politik badan-badan negara dan internasional meskipun realitas ini dan implikasinya sebagian besar tidak disadari (Korten 1997, 90).

Lebih lanjut, Korten mengemukakan bahwa saling berkaitan dengan pembicaraan politik tentang pasar bebas dan perdagangan bebas adalah sebuah pesan bahwa kemajuan pasar bebas adalah kemajuan demokrasi. Di tengah semakin meningkatnya perasaan tidak percaya kepada pemerintah, pesan ini terasa sangat meyakinkan. Pesan ini mengandung suatu kebenaran penting bahwa pasar dan politik memang menyangkut penguasaan, kekuatan, dan alokasi sumber daya masyarakat. Jika pasar semakin bebas dan semakin mengglobal, kekuatan untuk menguasai semakin berpindah dari pemerintah ke korporasi global (Korten 2002, 107-109).

Korten menggambarkan bagaimana demokrasi dikalahkan oleh kapitalisme sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Pada tahun 1980-an, kapitalisme menang atas komunisme. Tahun 1990-an, kapitalisme menang lagi atas demokrasi dan ekonomi pasar. Bagi sementara orang, di antara kita yang tumbuh dan dibesarkan dengan keyakinan bahwa kapitalisme merupakan pondasi demokrasi dan pasar bebas, pasti akan terkejut ketika mengetahui bahwa dalam kapitalisme, demokrasipun dapat dijual kepada penawar tertinggi, dan bahwa pasar bebas itu sebenarnya direncanakan secara terpusat oleh megakorporasi global yang ukurannya lebih besar dari banyak negara yang ada (Korten 2002, 74).

Kekhawatiran menguatnya pengaruh korporasi terhadap entitas politik negara dapat dilihat dalam dua sudut pandang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pertama, kemampuan memengaruhi perusahaan-perusahaan multinasional dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Pada akhir 1980-an, korporasi-korporasi Jepang mengeluarkan sekitar \$ 100 juta setahun untuk lobi politik di Amerika Serikat (AS) dan \$ 300 juta lagi untuk membangun jaringan politik rakyat jelata guna memengaruhi opini masyarakat. Dalam kategori berbeda, tetapi mempunyai kesamaan substansi, adalah bagaimana Pemerintah Meksiko mengeluarkan lebih dari \$ 25 juta dan merekrut banyak pelobi Washington terkemuka untuk mendukung kampanye NAFTA (Korten 2002, 224). NAFTA adalah representasi regionalisme ekonomi yang menegaskan bagaimana negara nasional secara sistematis memfasilitasi perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan perdagangan lebih intensif dalam suatu kawasan.

Dalam kaitannya dengan politik warga negara, terdapat hubungan yang asimetris antara perusahaan-perusahaan multinasional dan warga negara lainnya pada satu sisi, dan hubungan-hubungan mereka dengan negara pada sisi yang lain. Apa yang dikhawatirkan Korten ketika mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional tengah merepresentasikan dirinya menjadi kekuasaan politik dilihat dalam konteks ini. Kebanyakan perusahaan multinasional mempunyai unit departemen tersendiri yang mampu melakukan lobi-lobi intensif kepada pemerintahan nasional sehingga kebijakan pemerintah dijamin tidak akan merugikan kepentingan mereka.

Inilah yang menyebabkan pemerintah cenderung melindungi kepentingan korporasi jika terjadi konflik antara buruh dengan perusahaan. Kemampuan lobi yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional inilah yang menjadi awal kehancuran demokrasi representatif karena pemerintahan nasional terlegitimasi yang terbentuk atas pilihan rakyat lebih mementingkan kepentingan korporasi dibandingkan dengan membuat keputusan politik yang menguntungkan warga negara.

Globalisasi juga menyumbangkan ketimpangan ekonomi yang semakin luas dan tajam. Pada pertengahan 1990-an, dengan mengambil garis kemiskinan yang ekstrim dengan menyejajarkan konsumsi per hari dengan satu dollar AS, sekitar 33 persen penduduk dunia yang berada di negara-negara sedang berkembang berada dalam kesengsaraan. Dalam masyarakat miskin ini, sekitar 550 juta berada di Asia Selatan, 215 juta berada di Sub-Sahara Africa, dan 150 juta berada di Amerika Latin (Castel 2000).

Sementara itu, International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat dari 53,5 persen di tahun 1985 menjadi 54 persen di tahun 1990 di Sub-Sahara Afrika, meningkat dari 23 persen menjadi 27,8 persen di Amerika Latin, menurun dari 61,1 persen menjadi 59 persen di Asia Selatan, serta menurun dari 15,7 persen menjadi 14,7 di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sejalan dengan meluasnya jumlah orang miskin di dunia dan kesenjangan yang semakin melebar, kondisi di bidang jaminan kesehatan juga semakin sama buruknya. Sejak 1990, usia harapan hidup menurun di 33 negara. Pada 1997, angka kematian di bawah usia lima tahun di negara-negara terkaya adalah 8 berbanding 1000 lahir hidup, sedangkan di negara-negara sedang berkembang 169 berbanding 1000 lahir hidup (Bank Dunia 1999, 31).

Kesenjangan ternyata tidak hanya terjadi antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Kesenjangan dalam pendapatan dan kesejahteraan ternyata juga terjadi dalam negara maju. *The United States Census Bureau, Supplemental Income Inequality Table 2001* menegaskan bahwa sepanjang 1967-1980,

ketimpangan pendapatan di AS sebenarnya mengalami penyusutan. Ini terbukti dari pendapatan rumah tangga termiskin yang mengalami peningkatan sebesar 6,5 persen dari total pendapatan. Sementara itu, seperlima pendapatan rumah tangga terkaya dari keseluruhan jumlah penduduk menyusut hingga 10 persen. Namun pada 1980, keadaan berbalik drastis. Seperlima jumlah rumah tangga termiskin kehilangan sebanyak 11,6 persen pendapatan, dan seperlima rumah tangga terkaya memperoleh peningkatan hampir 20 persen. Pada periode 1990-an, ketimpangan menjadi semakin parah. Seperlima jumlah rumah tangga kaya senantiasa merasakan peningkatan pendapatan (Bank Dunia 1999, 31).

Kesenjangan dalam hal kekayaan ini paralel dengan kesenjangan pendapatan masyarakat di AS. Laporan yang sama menyebutkan bahwa antara 1947-1973, pendapatan rata-rata para pekerja AS meningkat lebih dari dua kali lipat. Sementara pekerja di tingkat paling bawah, yang jumlahnya 20 persen, menikmati jumlah keuntungan yang paling besar. Namun, sejak 1973, pendapatan rata-rata pekerja merosot sekitar 15 persen. Sementara, 20 persen pekerja di tingkat paling bawah, terpuruk dan tertinggal jauh di belakang. Dari seluruh pendapatan, lebih dari 40 persen-nya masuk ke kantong orang yang paling kaya, yang jumlahnya hanya sebesar 1 persen.

Pelajaran yang dapat diambil dari fakta dan data di atas adalah globalisasi neoliberal ternyata gagal menciptakan kemakmuran. Bahkan sebaliknya, globalisasi telah membuat kesenjangan dalam hal pendapatan dan kesejahteraan semakin merosot. Bagi demokrasi, kemiskinan dan kesenjangan dalam pendapatan akan mengurangi derajat kesetaraan politik dan otonomi warga negara. Dengan demikian, globalisasi neoliberal lebih cenderung menciptakan krisis bagi demokrasi dibandingkan dengan mendorong ke arah penciptaan demokrasi yang luas dan stabil.

Globalisasi juga telah membuka peluang bagi munculnya kekuasaan transnasional dalam bentuk perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi lintas batas negara. Kekuasaan korporasi ini melebihi kekuatan yang dimiliki beberapa negara nasional. Mereka mampu memengaruhi keputusan-keputusan politik negara sehingga demokrasi tidak lagi diorientasikan untuk kepentingan warga negara, tetapi demi kepentingan korporasi.

The Deepening Democracy dan Democratizing Democracy

Meluasnya kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan baik di dalam maupun antarwarga negara sebagai akibat globalisasi neoliberal telah membuat demokrasi dalam krisis. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa

globalisasi tidak mempunyai sumbangan apapun bagi demokrasi. Setidaknya, globalisasi informasi telah mendorong menyebarnya ide-ide tentang demokrasi ke seluruh dunia. Sementara itu, daya tahan rezim-rezim otoriter yang menindas juga akan diuji oleh banyak tekanan internasional sebagai akibat globalisasi informasi. Demikian juga dengan kekuatan-kekuatan nonpemerintah yang kini mulai terlibat aktif dalam mendorong demokrasi politik. Mereka mempunyai jaringan di seluruh dunia guna saling menguatkan satu dengan lainnya. Konferensi dan seminar antargenerasi demokrasi di seluruh dunia telah banyak dilakukan dan menjadi inspirasi bagi gerakan demokrasi di negara-negara otoriter. Sementara bagi negara-negara demokrasi, yang diperlukan adalah pendalaman demokratisasi itu sendiri.

Dalam *The Runaway World*, Anthony Giddens mengemukakan bahwa apa yang dibutuhkan di negara demokratis adalah pendalaman demokrasi (*a deepening democracy*) itu sendiri. Giddens menyebutnya sebagai demokratisasi atas demokrasi (*democratizing democracy*). Namun, demokrasi dewasa ini juga harus bersifat transnasional. Menurut Giddens, pendalaman demokrasi dibutuhkan karena mekanisme lama pemerintahan tidak berjalan dalam sebuah masyarakat di mana warga negaranya hidup dalam informasi yang sama dengan yang berkuasa.

Pemerintahan demokratis Barat tentu saja tidak pernah sedemikian menyimpan rahasia sebagaimana di negara-negara komunis atau tipe pemerintahan otoriter lainnya. Namun, dalam beberapa konteks, mereka sudah tentu mempunyai rahasia. Selain itu, sistem demokrasi Barat juga telah menggunakan jaringan pertemanan (kroni), kolusi, dan politik uang serta kesepakatan-kesepakatan terselubung. Mereka seringkali menggunakan simbolisme tradisional dan bentuk-bentuk tradisional kekuasaan yang tidak demokratis (Giddens 2002, 74-75).

Demokratisasi atas demokrasi ini akan mengambil bentuk yang berbeda-beda dalam berbagai negara, tergantung pada latar belakang masing-masing. Demokratisasi demokrasi seringkali mengimplikasikan reformasi konstitusional dan pengembangan transparansi dalam urusan politik. Selain itu, perlu adanya eksperimen dengan prosedur demokrasi alternatif, khususnya jika prosedur semacam ini dapat membuat keputusan politik yang dekat dengan kepentingan warga sehari-hari.

Untuk itu, partai politik harus terbiasa menjalin kerja sama dengan kelompok berisui tunggal, seperti kelompok penekan yang peduli lingkungan hidup. Selain itu, demokratisasi atas demokrasi juga bergantung pada upaya mengembangkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang kuat karena pasar tidak dapat menghasilkan budaya semacam itu. Begitu pula halnya keragaman kelompok dengan kepentingan khusus.

Menurut Giddens, perlu dipahami bahwa tidak hanya ada dua sektor dalam masyarakat, yaitu negara dan pasar, atau wilayah publik dan wilayah perorangan. Namun, di antara keduanya, terdapat pula masyarakat sipil, termasuk keluarga dan lembaga nonekonomi lainnya (Giddens 2002, 36-37).

Di tingkatan global, transformasi politik yang menyusul bersamaan dengan tumbuhnya kesalinghubungan (*interconnectedness*) di antara negara dan masyarakat serta semakin meningkatnya intensitas jaringan internasional memerlukan suatu pengujian kembali atas teori politik dalam bentuk dan ruang lingkup yang sama fundamentalnya, seperti perubahan yang menghasilkan inovasi konseptual dan institusional negara modern itu sendiri (Held 1995, 143).

Karena itu, penting kiranya dikemukakan suatu gagasan baru yang dapat digunakan untuk menjelaskan transformasi sosial politik yang tengah berlangsung, terutama kaitannya dengan kedaulatan negara demokrasi modern. Meskipun pandangan kaum skeptis mengatakan bahwa globalisasi tidak menghancurkan sama sekali - tetapi hanya mengurangnya saja- kedaulatan negara nasional sebagaimana diyakini kaum hiperglobalis, namun yang jadi persoalan adalah globalisasi telah mengartikulasikan kewajiban dan kekuasaan negara bangsa dalam suatu cara yang kompleks, yang melibatkan perkembangan ke arah menyebarnya kekuasaan dunia dan diiringi oleh menyebarnya otoritas dan bentuk-bentuk pengaturan yang kompleks. Dalam kaitan ini, Held menyebutkan terjadinya "*the reconfiguration of political power*" (Held 2001).

Demokrasi kosmopolitan merupakan pemahaman baru tentang demokrasi sambil memperhitungkan *interlocking* proses-proses politik dan ekonomi pada level lokal, nasional, dan global. Redefinisi demokrasi yang sifatnya lintas batas negara itu bertujuan agar isu-isu yang dewasa ini berada di luar jangkauan *nation state*, seperti aliran kapital global, beban utang negara-negara berkembang, krisis ekologi, dan masalah keamanan internasional dapat ditundukkan pada kontrol demokrasi demi kepentingan kemanusiaan yang lebih universal (Jemadu 2001).

Demokrasi kosmopolitan perlu didukung oleh keadilan distributif (*distributive justice*). Ini diberikan untuk memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga pemerintahan global dan tatanan dunia pada saat negara mendapatkan penekanan kembali. Pendekatan kosmopolitan ini mengandung pengertian bahwa kahidupan politik akan mempunyai aspek global dan lokal sekaligus. Dengan demikian, akan terjadi demokratisasi ganda (*double-democratized*). Demokrasi akan diperkuat di tingkat nasional dan organisasi-organisasi internasional, baik melalui masyarakat sipil maupun melalui wakil-wakilnya (Qadhafi 2005).

Selanjutnya, agar model demokrasi kosmopolitan ini dapat dilaksanakan, terdapat beberapa proses yang harus berlangsung. Pertama, model demokrasi

kosmopolitan akan mencari kubu hukum demokratis kosmopolitan guna memberikan bentuk dan batas-batas bagi pembuatan keputusan politik. Hukum demokratis kosmopolitan ini dipahami sebagai suatu wilayah hukum dalam jenis yang berbeda dari hukum yang dibuat antara satu negara dan negara lain, yaitu hukum internasional.

Held mengambil konsep hukum kosmopolitan ini dari Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hukum kosmopolitan adalah suatu cara memahami hukum yang tidak fantastis dan tidak pula utopis, tetapi suatu “pelengkap yang perlu” bagi aturan tidak tertulis hukum nasional dan internasional yang ada, dan suatu sarana untuk mentransformasikan hukum internasional menjadi hukum kemanusiaan publik (Held 1995). Ini karena tempat-tempat kekuasaan bisa saja terdapat di lingkungan nasional, transnasional, dan internasional, yang mana kekuasaan ini menjadi ancaman potensial terhadap demokrasi karena kemampuannya dalam membatasi otonomi.

Karena itu, hukum publik demokratis dalam suatu komunitas politik memerlukan hukum demokratis dalam lingkungan internasional. Menurut Held, hukum publik demokratis ini perlu ditunjang oleh struktur hukum internasional yang ia sebut sebagai hukum demokratis kosmopolitan. Untuk itu, hukum demokratis kosmopolitan perlu dimasukkan ke dalam konstitusi-konstitusi parlemen dan majelis-majelis, baik pada tingkat nasional maupun internasional; dan pengaruh pengadilan internasional ini diperluas agar kelompok dan individu mempunyai sarana yang efektif untuk menuntut otoritas politik bagi penetapan dan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pokok, baik di dalam maupun di luar perhimpunan politik.

Kedua, searah dengan perkembangan ini, model demokrasi kosmopolitan akan mengusahakan terciptanya lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif transnasional yang efektif pada tingkat regional dan global, yang terikat oleh syarat-syarat hukum demokratis pokok.

Kesimpulan

Tulisan ini berusaha mendiskusikan hubungan-hubungan antara globalisasi dan demokrasi, tepatnya bagaimana globalisasi memberikan sumbangan positif bagi demokrasi, atau sebaliknya menciptakan krisis demokrasi. Bagi demokrasi, globalisasi akan menyumbangkan dua sisi sekaligus, yakni mendorong proses demokratisasi dan sekaligus menciptakan krisis. Ketimpangan dan menguatnya kekuatan korporasi telah menciptakan ketidaksetaraan politik, dan karenanya menciptakan krisis demokrasi. Sementara itu, perkembangan teknologi komunikasi telah mendorong kemunculan ide dan gerakan demokrasi

transnasional, dan dalam situasi semacam ini proses demokratisasi akan berlangsung. Negara-negara otoriter akan menghadapi tantangan berat dari globalisasi informasi, dan mau tidak mau mereka harus membuka diri bagi proses demokrasi politik.

Usaha yang barangkali perlu dilakukan di era globalisasi sekarang ini adalah bagaimana melakukan demokratisasi atas demokrasi. Ini akan mengambil bentuk yang berbeda-beda dalam berbagai negara, tergantung pada latar belakang masing-masing. Demokratisasi demokrasi seringkali mengimplikasikan reformasi konstitusional, dan pengembangan transparansi dalam urusan politik. Selain itu, perlu adanya eksperimen dengan prosedur demokrasi alternatif, khususnya jika prosedur semacam ini dapat membuat keputusan politik dekat dengan kepentingan warga sehari-hari. Gagasan demokrasi kosmopolitan mungkin bisa menjadi proyek bersama meskipun tampaknya akan menghadapi kendala yang tidak sedikit. Demokrasi akan berjalan lebih baik dalam lingkup kecil dan semakin akan berkurang jika berada dalam lingkup yang lebih besar.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

Carothers, Thomas, 1991. *In The Name of Democracy: US Policy Toward Latin America in the Reagan Years*. San Fransisco: University of California Press.

Castel, Manuel, 2000. "The Rise of the Fourth World", dalam David Held and Anthony McGrew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.

Coleman, William D. dan Geoffrey R.D. Underhill, 1998. "Introduction: Domestic Politics, Regional Economic Cooperation and Global Economic Integration", dalam William D. Coleman and Geoffrey R.D. Underhill (eds.), 1998. *Regionalism and Global Economic Integration: Europe, Asia, and the Americas*. London and New York: Routledge.

Dahl, Robert, 1998. *On Democracy*. Yale University Press.

Giddens, Anthony, 2002. *The Runaway World*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Fukuyama, Francis, 2003. *The End of History and the Last Man*. Yogyakarta: Qalam.
- Garrett, Geoffrey, 2000. "Global Markets and National Politics", dalam David Held and Anthony McGrew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.
- Harvey, David, 2000. "Time-Space Compression and the Postmodern Condition", dalam David Held and Anthony Mc Grew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.
- Held, David, 1995. *Democracy and the Global Order*. California: Stanford University Press.
- _____, et al., 1999. *Global Transformations: Politics, Economic, and Culture*. California: Stanford University Press.
- Hertz, Noreena, 2003. *Global Capitalism and the Death of Democracy*. New York: HarperCollins Publishers Inc.
- Korten, David, 1997. *When Corporations Rule The World (Bila Korporasi Menguasai Dunia)*. Jakarta: Profesional Books.
- _____, 2002. *The Post Corporate World: Life After Capitalism The Post Corporate World: (Kehidupan Setelah Kapitalisme)*. terj. A. Rahman Zainudin. Jakarta: Yayasan Obor.
- Krasner, 2000. "Compromising Westphalia", dalam David Held and Anthony Mc Grew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.
- Perraton, Jonathan et al., 2000. "Economic Activity in A Globalizing World", dalam David Held and Anthony McGrew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.
- Petras, James dan Henry Veltmeyer, 2002. *Imperialisme Abad 21*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Robinson, William I., 2003. "Neoliberalisme, Elit Global, dan Transisi Guatemala: Sebuah Analisis Kritis Makrostruktural", dalam William I. Robinson (ed.). *Hantu Neoliberalisme*, Jakarta: C-Books.

Sklair, Lesly 2001, *Globalization: Capitalism and Its Alternative*. Oxford University Press.

Sorensen, Georg. 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Dunia yang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CCSS.

Winarno, Budi, 2007. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Yogyakarta: MedPress.

Artikel Jurnal

Bourdieu, Pierre, 2003. "Kritik terhadap Neoliberalisme: Utopia Eksploitasi Tanpa Batas menjadi Kenyataan", *Basis*, **52** (11-12), November-Desember 2003.

Held, David, 2000. "Regulating Globalization? The Reinvention Politics". *International Sociology*, **15** (2): 394-408

Priyono, Herry, 2004. "Marginalisasi ala Neoliberal", *Basis*, **53** (05-06), Mei-Juni 2005.

Sklair, Leslie. 2002, "Demokrasi and Transnational Capitalist Class", *ANNAL AAPSS*, **581**, Mei 2002.

Yeates, Nicola. 2002, "Globalization and Social Policy: From Global Neoliberal Hegemony to Global Political Pluralism", *Global Social Policy*, **2** (x): 69-91.

Artikel Koran

Jemadu, Aleksius, 2001. "Demokrasi Global", *Kompas*, 30 Mei.

Artikel Online

Al Qadhafi, Saif Al Islam, 2005. "By The People for the People", dalam <http://www.globalagendamagazine.com/2005/saifalislam/qadhafi.asp>.

Held, David, 2001. "Globalization, Cosmopolitanism, and Democracy: An Interview", *IDEES* of the Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, Generalitat de Catalunya, dalam <http://www.polity.co.uk/global/held.htm>.